FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

Rusdarti & Lesta Karolina Sebayang
Universitas Negeri Semarang
rusdarti@gmail.com

Abstrak: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Iawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi dan berada di posisi 12 dari 33 provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan belanja publik terhadap kemiskinan. Analisis data menggunakan teknik Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Faktanya bahwa jumlah orang miskin di daerah lebih besar daripada kota. Secara statistik, PDRB dan variabel lainnya seperti pengeluaran publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran pengaruhnya tidak signifikan.

Kata kunci: Kemiskinan, belanja publik, PDRB

Abstract: Factors Affecting Poverty Rate in Central Java Province. Central Java province has a high number of poor people and is in position 12th of the 33 provinces in Indonesia. The purpose of this study is to describe poverty in Central Java and to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), unemployment, and public spending on poverty. Analysis of data used Ordinary Least Square (OLS) technique. The result shows that decline in unemplyment rate had no significant effect on poverty. In fact, the number of poor people in rural area is gretaer than those in urban area. Statistically, other variables such as GRDP and public spending have significant effect on poverty while unemployment effect is not significant.

Key word: Poverty, public expenditure, GRDP

PENDAHULUAN

Terpaan krisis ekonomi tidak hanya meluluhlantahkan program-program pembangunan, namun juga merusak tatanan ekonomi masyarakat yang telah terbangun sebagai hasil dari pembangunan yang selama ini dilakukan. Lebih parah lagi, kondisi krisis telah menjadikan sebagian besar masyarakat tidak dapat lagi menikmati fasilitas-fasilitas mendasar, seperti fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana transportasi dan lain sebagainya. Secara lokal maupun nasional, kemiskinan mempunyai empat dimensi pokok, yaitu kurangnya kesempatan (*lack of opportunity*), rendahnya kemampuan *(low of capabilities*), kurangnya jaminan (*low-level of security*), dan ketidakberdayaan *(low of capacity or empowerment*).

Dalam memahami masalah kemiskinan di Indonesia, perlu diperhaikan lokalitas yang ada di masing-masing daerah, yaitu kemiskinan pada tingkat lokal yang ditentukan oleh komunitas dan pemerintah setempat. Dengan demikian kriteria kemiskinan, pendataan kemiskinan, penentuan sasaran, pemecahan masalah dan upaya-upaya pe-

Tabel 1. Peringkat Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Provinsi Tahun 2007

No	Provinsi	2006	2007	Selisih	Peringkat
1	Nanggroe Aceh Darussalam	28.28	26.65	1.63	6
2	Sumatera Utara	15.01	13.9	1.11	18
3	Sumatera Barat	12.51	11.9	0.61	22
4	R i a u	11.85	11.2	0.65	24
5	J a m b i	11.37	10.27	1.1	27
6	Sumatera Selatan	20.99	19.15	1.84	14
7	Bengkulu	23	22.13	0.87	10
8	Lampung	22.77	22.19	0.58	9
9	Kepulauan Bangka Belitung	10.91	9.54	1.37	28
10	Kepulauan Riau	12.16	10.3	1.86	26
11	DKI Jakarta	4.57	4.61	-0.04	33
12	Jawa Barat	14.49	13.55	0.94	19
13	**Jawa Tengah**	**22.19**	**20.43**	**1.76**	**12**
14	DI Yogyakarta	19.15	18.99	0.16	16
15	Jawa Timur	21.09	19.98	1.11	13
16	Banten	9.79	9.07	0.72	30
17	B a l i	7.08	6.63	0.45	32
18	Nusa Tenggara Barat	27.17	24.99	2.18	7
19	Nusa Tenggara Timur	29.34	27.51	1.83	4
20	Kalimantan Barat	15.24	12.91	2.33	20
21	Kalimantan Tengah	11	9.38	1.62	29
22	Kalimantan Selatan	8.32	7.01	1.31	31
23	Kalimantan Timur	11.41	11.04	0.37	25
24	Sulawesi Utara	11.54	11.42	0.12	23
25	Sulawesi Tengah	23.63	22.42	1.21	8
26	Sulawesi Selatan	14.57	14.11	0.46	17
27	Sulawesi Tenggara	23.37	21.33	2.04	11
28	Gorontalo	29.13	27.35	1.78	5
29	Sulawesi Barat	20.74	19.03	1.71	15
30	Maluku	33.03	31.14	1.89	3
31	Maluku Utara	12.73	11.97	0.76	21
32	Papua Barat	41.34	39.31	2.03	2
33	Papua	41.52	40.78	0.74	1

(Sumber: BPS, 2007)

nanggulangan kemiskinan dapat lebih objektif dan tepat sasaran.

Sebagai negara berkembang, Indonesia telah mencatat prestasi membanggakan dalam memberantas kemiskinan selama periode 1976 sampai awal krisis ekonomi 1997. Pada tahun 1976 jumlah orang miskin mencapai 54,2 juta jiwa atau 40,1% dari jumlah penduduk dan pada tahun 2004 jumlah orang miskin sekitar 36,1 juta jiwa atau 16,66% dari jumlah penduduk (BPS, 2005).

Dalam rangka mengatasi kemiskinan baik secara lokal maupun nasional, pemerintah melaksanakan agenda pemulihan eko-

nomi sesudah krisis 1997 bersamaan dengan kebijakan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten/kota. Diharapkan dengan otonomi daerah maka upaya percepatan pembangunan ekonomi atas dasar inisiatif lokal dapat diwujudkan guna mengatasi masalah pembangunan di daerah.

Instrumen otonomi daerah yang menonjol adalah dikeluarkannya kebijakan desentralisasi fiscal yang memberikan lebih banyak sumber daya keuangan pada kabupaten/kota. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan desentralisasi fiskal adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sidik, 2005:1). Diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan percepatan pembangunan dengan mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Masalah kemiskinan yang bersifat lokal spesifik dapat ditangani dengan cepat dan tuntas oleh pemerintah daerah.

Dilihat dari tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi yang relatif memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi di antara provinsi di Indonesia (Tabel 1). Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peringkat ke-12 dari 33 Provinsi di Indonesia. Provinsi dengan tingkat kemiskinan dua (2) tertinggi adalah Provinsi Papua dan Papua Barat. Sedangkan Provinsi dengan persentase penduduk terendah adalah DKI Jakarta dan Bali. Jawa Tengah dengan urutan 12 menunjukkan adanya fenomena ini bahwa masih tinggi persentase kemiskinan di Jawa mengingat Provinsi Jawa Tengah dengan akses ekonomi di Daerah dengan penduduk miskin terendah yaitu DKI Jakarta dan Bali. Walaupun ada penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 sebesar 1,76 persen dibandingkan persentase tahun 2006.

Berdasarkan data pada Tabel 1, Provinsi Jawa Tengah termasuk peringkat pertama jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Jawa (Tabel 2).

Tabel 2. Peringkat Tingkat kemiskinan Provinsi di Jawa, 2007

Peringkat	Provinsi	Persentase
1	Jawa Tengah	20,43
2	Jawa Timur	19,98
3	DI Yogyakarta	13,55
4	Jawa Barat	18,99
5	DKI Jakarta	4,61

(Sumber: BPS, 2007)

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, besarnya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah adalah 20,43 persen, angka tersebut cukup besar dibandingkan dengan daerah lain di Jawa. Sejak era Pelita mulai tahun 1969 propinsi Jawa Tengah berada di antara dua (2) provinsi besar Jawa Barat-DKI Jakarta dan Jawa Timur, yang keduanya maju pesat melalui industrialisasi yang berpusat di Jabotabek dan Surabaya.

Apabila dikaji terhadap faktor penyebabnya, maka terdapat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata.

Hal ini disebabkan oleh keadaan kepemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan

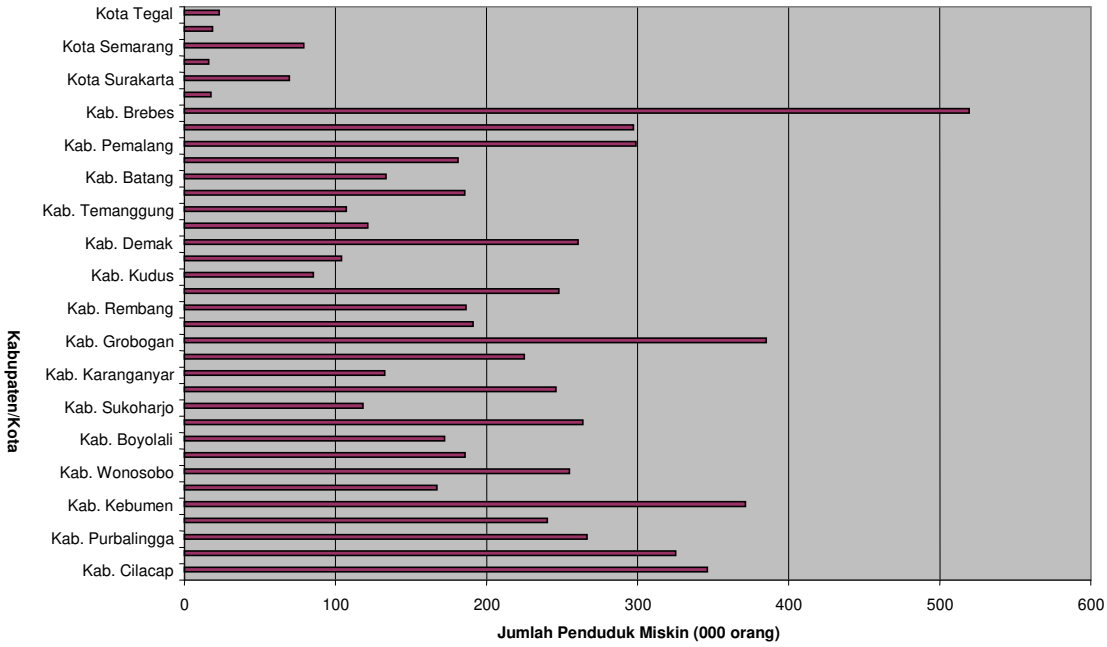

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2005)

menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan yang tidak merata. Ditinjau dari faktor penyebab, dapat dipastikan jika kemiskinan di pedesaan lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan. Berikut ilustrasi fenomena jumlah penduduk miskin di daerah.

Berdasarkan gambar di atas, pada tahun 2004 kabupaten yang paling besar jumlah penduduk miskinnya adalah Kabupaten Brebes sebesar 519.600 orang. Diikuti oleh Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kebumen masing-masing sebesar 385.100 orang dan 371.500 orang. Jumlah penduduk miskin yang paling sedikit di Kota Salatiga sebesar 16.000 orang. Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi di daerah. Indikator tingkat kesejahteraan ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan. Adanya wacana otonomi daerah harusnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Fakta menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin. Namun penurunan tersebut belum cukup signifikan terhadap perubahan aktivitas ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Boediono (1981: 1-2) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Bahkan dalam definisi yang lebih ketat definisi tersebut ditekankan pada sumber dari dalam negeri. Demikian halnya dengan daerah, pertumbuhan ekonomi akan dapat diwujudkan apabila pertumbuhan PDRB riil melebihi laju pertumbuhan penduduk. Tingkat kesejahteraan suatu negara diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah

proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999: 1).

Definisi pertumbuhan ekonomi banyak ditulis oleh para ekonom, di antaranya adalah Parkin dan Bede (1992:53) menyatakan : *Economic growth is an the rate change of real GNP from one year to next year*." Sementara Mankiw (1994:76) menyatakan : *To measure economic growth, economist use data on gross domestic product, which measures the total income of everyone in the economy* serta Samuelson dan Nordhaus (1995:750) menyatakan : *economic growth is an increase in the total output of a nation's over time, that measured as the annual rate of increase in a nation's real GDP or real potential GDP*.

Hal lain yang akan mendukung laju pertumbuhan yang lebih tinggi adalah dengan melakukan pengurangan kemiskinan dengan lebih cepat. Pengalaman dari masyarakat miskin, seperti halnya penyajian secara teoretis tentang standard hidup yang dikaitkan dengan kondisi multidimensional sifat dari kemiskinan dan perampasan (Sen 1985, 1999). Buchanan (1965), mengemukakan logika inti dari konsep pertumbuhan dan kemiskinan yang seharusnya difokuskan pada efisiensi penyediaan jasa kepada masyarakat sehingga keuntungan bagi kesejahteraan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Jasmina, et.al (2001:424) mengemukakan berbagai strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang sudah dicanangkan pemerintah daerah pada akhirnya tergantung pada ketersediaan dan mekanisme penggunaan anggaran yang dimiliki daerah.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh kebijakan anggaran yang menunjukkan keberpihakan pada masyarakat miskin (*pro-poor budget*). Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk mengukur hubungan antara kebijakan fiskal sebagai langkah untuk menurunkan kemiskinan (Andrew, 2002)

METODE

Data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi berupa data kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2007.

Data diperoleh dengan cara berikut. Pertama, studi kepustakaan (*library study*), dengan cara mempelajari berbagai literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kedua, studi dokumenter (*documenter study*), untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, data yang diperoleh yaitu jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah periode 2000 – 2004, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 periode 2000 – 2007, data jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, data pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan data keuangan daerah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

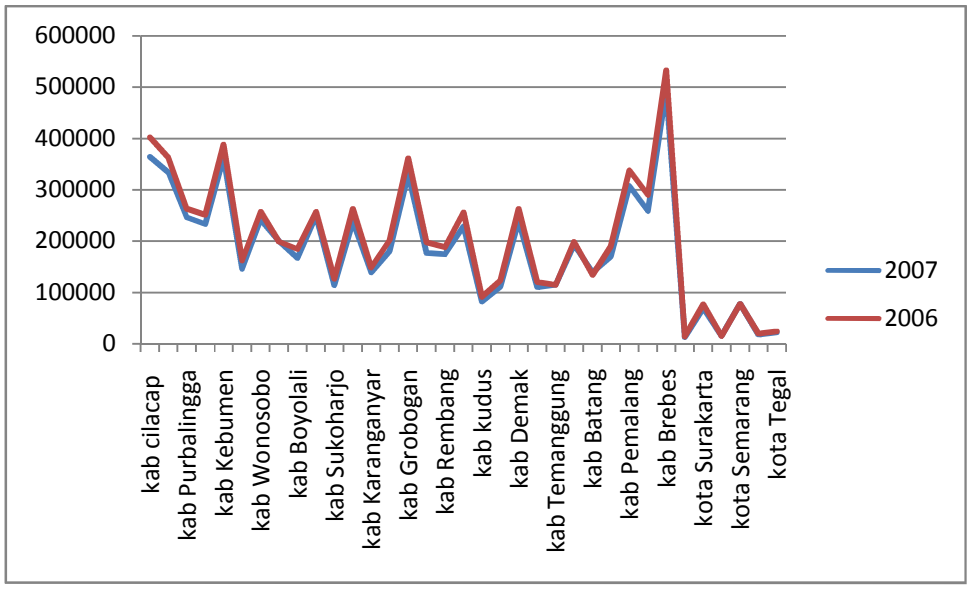

Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah (2007 dan 2006)

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan model regresi. Pada Pembahasan mencakup dua (2) aspek temuan yaitu: Pertama, pendekatan grafis sebagai pola fenomena kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, mengestimasi hubungan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan seperti Produk Domestik Bruto (PDRB), Belanja publik, dan pengangguran pada tahun 2007. Pada temuan kedua teknik yang digunakan adalah pendekatan model regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS).*

Berdasarkan observasi data yang dilakukan dan simulasi terhadap hasil regresi maka diputuskan model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

JPM = f (PDRB, Tingkat Pengangguran, Belanja Publik)

Model Persamaan:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \varepsilon$$

Di mana:

Y = Jumlah penduduk miskin (000)

X_1 = Nilai PDRB harga konstan 2000 (miliar rupiah)

X_2 = tingkat pengangguran (%)

X_3 = besarnya realisasi belanja APBD yang dikeluarkan untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (milyar rupiah)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *trend* digunakan untuk mengetahui pola secara grafis mengenai fenomena kemiskinan di masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

Perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2006 cenderung menurun pada tahun 2007, namun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan perubahannya hal itu ditunjukkan pada kurva yang tidak terlalu mengalami pergeseran. Secara grafis menunjukkan fenomena bahwa jumlah penduduk miskin cenderung banyak di kabupaten daripada kota di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk miskin paling rendah di Kota

Magelang sedangkan jumlah penduduk miskin paling tinggi ada di Kabupaten Brebes.

Fenomena yang terjadi adalah tingkat PDRB masing-masing daerah cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kemiskinan yang ada. Hal ini merupakan peluang jika daerah mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik maka akan berpengaruh pada penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Ketidakmerataan besarnya perolehan PDRB masing-masing daerah juga masih terlihat, hal ini akan mengindikasikan bahwa potensi masing-masing daerah juga berbeda, sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan pada beberapa jenis model dan dengan memperhatikan nilai *Akaike Info Criterion* (AIC) maka model yang digunakan adalah model *double log* maka diputuskan model yang digunakan menjadi sebagai berikut:

$$LnY = \alpha_0 + \alpha_1 LnX_1 + \alpha_2 LnX_2 + \alpha_3 LnX_3 + \alpha_3 D + \varepsilon$$

Di mana:

Y = Jumlah penduduk miskin (%)

X_1 = Nilai PDRB harga konstan 2000 (%)

X_2 = tingkat penganguran (%)

X_3 = besarnya realisasi belanja APBD yang dikeluarkan untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (%)

Ln = Logaritma natural

D = Dummy Variable (Kota dan Kabupaten)

Model regresi yang ditemukan diperoleh *Adjusted* R^2 sebesar = 0,87 artinya bahwa sebesar 87% persentase jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, pengangguran dan belanja publik. Pengaruh tersebut signifikan pada 0,05 karena hasil pengujian ditemukan nilai F sebesar 61,4 dengan p <0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan PDRB, pengangguran, belanja publik, dan *dummy variable* berpengaruh terhadap persentase jumlah penduduk miskin.

Lebih jauh lagi penelitian ini menemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap persentase jumlah penduduk miskin dengan koefisien sebesar -0,13. Hal ini mendukung teori yang ada yang artinya setiap kenaikan PDRB di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1% maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,13%.

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi

Variabel Independen	b	t
Constant	-80717,82	-2,47
Ln X_1	-0,00012	-1,94
Ln X_2	2,11	0,19
Ln X_3	0,0001	3,51
D	-1510286	-8,36

Sedangkan persentase pengangguran tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebab penduduk atau seseorang miskin bukan bersumber dari besarnya tingkat pengangguran. Kondisi ini juga didukung hasil Susenas, angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2006 mencapai 16,41 juta orang atau turun sebesar 1,36 persen dibanding tahun sebelumnya. Den-

gan angka ini, tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 60,68. Sedangkan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah relatif kecil, yaitu sebesar 7,30 persen. Bila dibedakan menurut status pekerjaan utamanya, buruh/karyawan sebesar 27,70 persen. Status pekerjaan ini lebih besar dibanding status pekerjaan lain. Sedangkan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain, berusaha sendiri dibantu buruh tetap dan pekerja lainnya masing-masing tercatat sebesar 19,14 persen, 20,90 persen, 3,17 persen dan 29,09 persen.

Perolehan hasil estimasi yang cukup menarik adalah koefisien belanja public bernilai positif dan signifikan secara statistik sebesar 1,28 artinya peningkatan belanja publik sebesar 1% maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1,28%. Hasil temuan ini menunjukkan masih dominannya belanja operasional/konsumsi pemerintah dengan orientasi belanja pegawai yang semakin tinggi menyebabkan rendahnya prioritas pada pelayanan publik. Adaptasi daerah terhadap perubahan kebijakan anggaran mengenai alokasi belanja publik bagi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga cukup mempengaruhi kesiapan pengalokasian anggaran untuk penyediaan pelayanan publik. Secara teori, pemerintah sebagai penyedia barang publik harus dapat mendistribusikan barang-barang publik dan penyelenggaraan pembiayaan dari pendistribusian barang publik (Hyman, 1996).

Sedangkan untuk *dummy variable* yang bertujuan untuk membedakan kabupaten dengan kota di Provinsi Jawa Tengah cukup signifikan artinya adanya perbedaan berpengaruh terhadap persentase jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kabananukye, et.al (2004) menunjukkan bahwa perbedaan wilayah dapat berpengaruh pada kemiskinan di Uganda.

Model di atas harus memenuhi asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, otokorelasi, dan heterosedasatisitas (Gujarati, 2003). Untuk itu pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan Jarcue-Bera dan menghasilkan nilai χ^2 sebesar 0,95 yang jauh lebih kecil daripada nilai χ^2 tabel sebesar 43,775 sehingga dapat dikatakan residual model berdistribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan korelasi parsial yang hasilnya menunjukkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas.

Uji otokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji d (uji D-W). Hasilnya menunjukkan bahwa nilai d yang ditemukan sebesar 1,91 dan berada di antara 1,73 (du) dan 2,27 (4-du). Oleh karena itu model terbebas dari otokorelasi. Uji heterosedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Obs*R-Square* dengan nilai χ^2 tabel. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai *Obs*R-squared* sebesar 9,48 dan χ^2 tabel sebesar 43,77. Oleh karena nilai *Obs*R-squar*e lebih kecil dari χ^2 berarti tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas. Dengan demikian seluruh asumsi klasik yang disyaratkan terhadap model yang dikembangkan dipenuhi.

SIMPULAN

Kecenderungan fenomena perubahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah cenderung tidak mengalami penurunan yang signifikan. PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah artinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengangguran tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, artinya indikator kemiskinan yang terjadi bukan disebabkan oleh tingkat pengangguran melainkan oleh indikator lain. Sementara itu belanja berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah artinya.

Hasil temuan ini menunjukkan masih dominannya belanja operasional/konsumsi pemerintah dengan orientasi belanja pegawai yang semakin tinggi menyebabkan rendahnya prioritas pada pelayanan publik. Perbedaan kota dengan kabupaten berpengaruh signifikan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan simpulan maka diperoleh implikasi kebijakan bahwa terkait dengan belanja daerah, pemerintah daerah harus konsisten merealisasikan anggaran yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat yang pada akhirnya tingkat kemiskinan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Andrew, Mc. K. (2002) “Assessing the Impact of Fiscal Policy on Poverty”. *Discussion Paper.* World Institute for Development Economics Research

Gujarati, Damodar N. (2003) *Basic Econometrics, Fourth Edition*. New York: McGraw Hill

Hyman, David N. (1996) *Public Finance A Contemporary Application of Theory to Policy*, Fifth Edition. The Dryden Press.

Makmum (2003) “Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya”. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol.7, No.2

Sen, A. (1985) *Commodities and Capabilities*. Amsterdam: North Holland

Sen, A. (1999) *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press

Sidik, Machfud (2005) “Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Kaitannya dengan Pembangunan Ekonomi Daerah”. *Makalah Seminar.* Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta